

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia,

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 angka 1.

_____,

Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 50 Tahun 1993.

_____,

Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, Keppres Nomor 53 Tahun 2001.

_____,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A-28 J.

_____,

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 191 Tahun 1999, TLN No. 3886, ps. 104 ayat (1).

_____,

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 3911. Ps.11 angka 1.

_____,

Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa lalu, Keppres Nomor 17 Tahun 2022, ps. 3.

B. Buku

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hlm. 35.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2016), Hal. 78

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.

Rhona. K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 12.

Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang, *Pengantar filsafat Hukum*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 42.

A. Masyhur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.22.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.77.

Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PBHI, 2002), hlm. 7.

Teguh Presetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm.42.

A. Masyhur Effendi, *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 24.

Serlika Aprita, dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hlm.66.

Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72.

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 57-58

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.

A. Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 274.

Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror: Belenggu Baru Bagi Kemerdekaan, dalam F. Budi Hadirman, et al. Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi, Imprasioal*, (Jakarta, 2003), hlm. 63.

Mark Freeman, *Komisi-Komisi Kebenaran dan Kepatutan Prosedural*, (Jakarta: ELSAM, 2008.), hlm. 18.

Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Setara Press, Malang, 2015), hlm., 169.

Enny Soeprapto, *Meninjau Ulang UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Tahun 2011), hlm.23.

Briiliawan Gama Rahmatullah, ed., *Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.35

C. Lain-lain

Firmandiaz dan Husodo, 2020. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari Kewenangannya". *Jurnal Hukum Kebijakan Publik, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNS*, (Vol. 4 No. 1, 2020), hlm. 17.

Rudi Priyosanto, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, diterbitkan oleh Rudi Priyosanto, (Vol. 15 No. 3 Tahun 2021).

Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora*, diterbitkan oleh Sosiohumaniora (Vol. 18 No. 2 Tahun 2016): 131-137.

Sunarjo, "Peradilan sebagai pilar Negara Hukum dalam perspektif Pancasila", *Jurnal Cakrawala Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang (Vol. 19, No.1 Tahun 2014): 71-81.

- Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, diterbitkan oleh Pusat Konstitusi dan Legislasi Nasional, (Vol. 4 No. 2 Tahun 2020): 41
- Nurfatihmah, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Karimah Tauhid*, diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik, Universitas Juanda Bogor, Indonesia, (Vol. 2 No. 1 Tahun 2023): 252.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia", (Sintesa): *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Vol. 8 No. 2 Tahun 2017).
- Wahyu Wibowo, Yusuf Setyadi, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, dan Abepura", (*Jurnal Of Islamic and Law Studies*), diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nasional (Vol. 5, No. 1, 2021), hlm. 107-121.
- Firdiansyah, "Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, diterbitkan oleh Komnas HAM, (Vol. XIII Tahun 2016).
- Shinta Agustina dkk, "Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Terhadap Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (Vol. 40, No. 2 Tahun 2011).
- Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, "Kesimpulan Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet", *Koran Tempo*, 17 Januari 2019.
- Nurhadi, "12 kasus pelanggaran HAM Berat yang pernah ditangani Komnas HAM". Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1616237/12-kasus-pelanggaran-ham-berat-yang-pernah-ditangani-komnas-ham> diakses pada tanggal 11 Juli 2023.
- Komnas HAM Republik Indonesia, "18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei", tersedia di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusuhan-mei.html> diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

Puji Nur Rahayu, "analisis kasus HAM di Indonesia (Wasior-
Wamena)", Tersedia di : https://www.academia.edu/11092055/analisis_kasus_HAM_Indonesia_Wamena_Wasior diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

Debora Kurniasih Perdana sitanggang, "pengertian hak asasi
manusia menurut para ahli", tersedia di : <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli#:~:text=sehingga%20bersifat%20suci.-3.%20Prof%20Darji%20Darmodiharjo,lain%20yang%20dimiliki%20manusia%20tersebut.> Diakses tanggal 20 Juni 2023.

Sayap Bening Law Office, *Teori tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, tersedia di : <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-tentang-hak-asasi-manusia-ham>. Diakses tanggal 23 Juni 2023.

Tim Hukum Online, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia : pengertian, jenis dan contohnya, tersedia di : <https://hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-1t618d10b275e29/>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

Tim Profilbaru, "Filsafat Hak Asasi Manusia", tersedia di : https://profilbaru.com/Filsafat_hak_asasi_manusia diakses tanggal 18 Juli 2023.

Luthfi Widyantoko, "Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi", tersedia di : https://www.academia.edu/34851331/Review_book_Hukum_dan_Ham_HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_NEGARA_HUKUM_DEMOKRASI docx#:~:text=Sosialis%20komunis%20memandang%20HAM%20hanya,mana%20penopang%20perjuangan%20sosialis%20komunis. diakses tanggal 19 Juli 2023.

Syahidah Izzata Sabila, "Ciri-ciri Negara Hukum beserta Pengertian menurut para ahli", tersedia di : <https://www.sonora.id/read/423638628/ciri-ciri-negara-hukum-beserta-pengertiannya-menurut-para-ahli#:~:text=Pengertian%20Negara%20Hukum%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Menurut%20Johan%20Nasution%2C%20negara%20hukum,seluruh%20kehendak%20didasarkan%20atas%20hukum.> Diakses tanggal 20 Juli 2023.

Siti M, "Negara Hukum: Pengertian, ciri-ciri dan perkembangan Negara Hukum", tersedia di : <https://www.gamedia.com/literasi/negara-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Oleh Tim Hukum Online, "Mengenal Pengadilan HAM ad hoc", tersedia di : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-ham-ad-hoc-lt600ad1938edfc/>. Diakses tanggal 20 Juli 2023.

Puji Nur Rahayu "Analisis Kasus HAM di Indonesia (Wasior-Wamena)". Tersedia di https://www.academia.edu/11092055/analisis_kasus_HAM_Indonesia_Wamena_Wasior diakses pada tanggal 11 September 2023.

Komnas HAM Republik Indonesia, "18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei", tersedia di <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-trageditrisakti-dan-kerusuhan-mei.html>. Diakses pada tanggal 11 September 2023.

Nurhadi, "12 kasus pelanggaran HAM Berat yang pernah ditangani Komnas HAM". Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1616237/12-kasus-pelanggaran-ham-berat-yang-pernahditangani-komnas-ham>. Diakses pada 13 september 2023.

Harian Rakyat Merdeka, "Hasto Atmojo Suroyo: Disiksa, Korban Tragedi Jambu Keupok Berharap Ada Kompensasi Ganti Rugi", <https://www.rmol.co/amp/2016/08/25/258263/Hasto-Atmojo-Suroyo:-Disiksa,-Korban-Tragedi-Jambu-Keupok-Berharap-Ada-Kompensasi-Ganti-Rugi>. diakses pada 13 september 2023.

Lucky Novita Zendrato, Skripsi: "Keterbatasan Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Studi Kasus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia)", (Sumatera Utara: Universitas HKBP Nommensen, 2022), Hal. 31. Tersedia di: <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7270>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2023..

Yohanes Liestyo Poerwoto, "Anak Jenderal Ahmad Yani Marah Soal Keppres dan Inpres tentang Pelanggaran HAM berat". Tersedia di : <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/09/29/anak-jenderal-ahmad-yani-marah-buntut-terbitnya-keppres-inpres-pemerintah-minta-maaf-ke-anak-pki?page=2>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

ELSAM. "Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi", (Koleksi Pusat: Dokumentasi ELSAM), hlm.4.
Tersedia di: <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/5.-Mendorong-pembentukan-kembali-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Andry Novelino, "*Mahfud Tegaskan Presiden Tak Pernah Minta Maaf kepada PKI*", Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230529164827-12-955418/mahfud-tegaskan-presiden-tak- pernah-minta-maaf-kepada-pki>. Diakses pada tanggal 17 oktober 2023.

Moh Khoeron, "Presiden Instruksikan Jajaran Tindaklanjuti Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat", tersedia di: <https://kemenag.go.id/nasional/presiden-instruksikan-jajaran-tindaklanjuti-rekomendasi-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-ya3ZQ>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Ady Thea DA, "Komnas HAM: Keppres 17 Tahun 2022 Tidak Menghilangkan Penegakan Pidana Pelanggaran HAM Berat", Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham--keppres-17-tahun-2022-tidak-menghilangkan-penegakan-pidana-pelanggaran-ham-berat-lt6351199813851/>. Diakses pada tanggal 17 oktober 2023.

Asf, "Infografis: Kelanjutan Kasus Pelanggaran HAM Berat", Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117073951-23-466149/infografis-kelanjutan-kasus-pelanggaran-ham-berat>. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Niken Sitoresmi, "Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat", Tersedia di: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2023.

Adi Wicaksono, "*Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat*", Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107142131-12-446354/jaksa-agung-ungkap-hambatanpenyelesaian-kasus-ham-berat>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

KontraS, "*Catatan Kritis Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial*"

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)", tersedia di: <https://kontras.org/2022/10/18/catatan-kritis-keputusan-presiden-nomor-17-tahun-2022-tentang-pembentukan-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat-masa-lalu-tim-ppham/>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024.